



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 257/KPTS/440/1/2019**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI MAROS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi dan Akurasi hasil pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP dan PPHP) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan Jasa Konsultasi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP dan PPHP) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di atas bertugas sebagai berikut:
- I. PjPHP bertugas sebagai berikut:
    - a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).
  - II. PPHP bertugas sebagai berikut:
    - a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).
- KETIGA : Kepada pejabat dimaksud Diktum Pertama di atas diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pada Kegiatan:

1. Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor dengan kode Kegiatan: 1.02.1.02.01.002.001 dan Kode Rekening 5.2.3.49.02.
2. Pengadaan IPAL dan Sarana Air Bersih Puskesmas dan Jaringannya dengan Kode Kegiatan 1.02.1.02.C1.018.016 dan Kode Rekening 5.2.2.03.23

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 7 Januari 2019

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MAROS" is at the bottom. In the center is a Garuda, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star above it. The text "WAKIL BUPATI MAROS," is written across the seal in a bold, sans-serif font.  
**WAKIL BUPATI MAROS,**  
A handwritten signature in black ink is written over the seal and extends to the right.  
**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

**Tembusan**

- yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Maros di Maros;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
  4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Maros di Maros;
  5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
  6. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 257/KPTS/440/1/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT  
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL  
PEKERJAAN LINGKUP DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN PjPHP/PPHP**

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	PENETAPAN HONORARIUM ORANG/PAKET
1.	<b>PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)</b>  1. Rahmatullah, SKM NIP. 19840426 201101 1 001	-	1. Nilai Total Anggaran Pengadaan sampai dengan Rp200 Juta Rp400.000,00 Perpaket. 2. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp200 Juta s/d Rp1 miliar Rp300.000,00 OP.
2.	<b>PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)</b>  1. IRWAN, SKM NIP. 19780823 201508 1 001  2. SITTI MARWATI, S.KM Nip. 19770209 200312 2 005  3. Muhammad Ramli Nip. 19780602 201508 1 001	Ketua  Sekertaris  Anggota	3. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp1 Miliar s/d 5 Miliar Rp600.000,00 OP. 4. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp5 Miliar Rp1.000.000,00 OP.

**WAKIL BUPATI MAROS,****Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**